



LAPORAN KEGIATAN

COACHING CLINIC

PPID PROVINSI SUMATERA UTARA



*Penguatan Kapasitas dan Sinergi
PPID dalam Mewujudkan Layanan
Informasi Publik yang Berkualitas*





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kode Pos 20152
Telepon (061) 4156000

Medan, 29 Juli 2026

Nomor : 400.3.5.3/003/VII/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (Dua) Lembar
Hal : Undangan

Yth. **(Daftar Terlampir)**
di
Tempat

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menyelenggarakan Kegiatan Coaching Clinic dan Pembinaan kepada PPID Pelaksana di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada :

hari/ tanggal : Kamis s/d Jumat, 6 s/d 7 Agustus 2026
pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
tempat : Aula Transparansi Dinas Kominfo Provsu
Jl. HM. Said No. 27 Medan

Untuk itu diminta kepada Saudara agar menugaskan PPID Pelaksana dan Admin PPID Pelaksana dengan membawa Surat Keputusan tentang Tim PPID Pelaksana Perangkat Daerah dan membawa laptop pada jadwal yang sudah ditentukan (terlampir). Konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr Rahmad Saleh Daulay, SE, MAP (Hp 085361887095).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pj. Sekretaris Daerah,



Sulaiman Harahap

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara;
2. Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Lampiran I

Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 400.3.5.3/003/VII/2026
Tanggal : 29 Juli 2026

DAFTAR PERANGKAT DAERAH PEMPROVSU DAN BUMD

1. Inspektur Provinsi Sumatera Utara
2. Sekretaris DPRD Provsu
3. Kepala Badan Kepegawaian Provsu
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provsu
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provsu
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provsu
10. Kepala Badan Penghubung Provsu
11. Kepala Dinas Sosial Provsu
12. Kepala Dinas Kesehatan Provsu
13. Kepala Dinas Pendidikan Provsu
14. Kepala Dinas Perhubungan Provsu
15. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provsu
16. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provsu
17. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu
18. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu
19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu
20. Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provsu
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu
22. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provsu
23. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provsu
24. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu
25. Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya Provsu
26. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provsu
27. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provsu
28. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu
29. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu
30. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provsu
31. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provsu
32. Kepala Biro Umum Setdaprovsu
33. Kepala Biro Hukum Setdaprovsu
34. Kepala Biro Organisasi Setdaprovsu
35. Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu
36. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu
37. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu
38. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu
39. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu
40. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu
41. Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem
42. Direktur Rumah Sakit Umum Haji Medan
43. Direktur Rumah Sakit Khusus Mata
44. Direktur Rumah Sakit Khusus Paru
45. Direktur Rumah Sakit Umum Kusta
46. Direktur Utama Perumda Tirtanadi

47. Direktur Utama PD Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara
48. Direktur Utama PT Bank Sumut
49. Direktur Utama PT Dhirga Surya
50. Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Persorada)
51. Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara

Lampiran II

Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 400.3.5.3/003/VII/2026
Tanggal : 29 Juli 2026

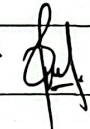
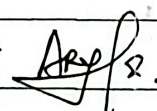
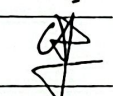
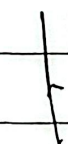
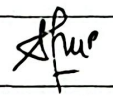
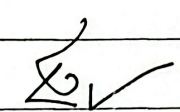
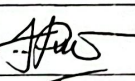
JADWAL COACHING CLINIC PPID PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUMD

Waktu	Nama Perangkat Daerah / BUMD
Kamis, 6 Agustus 2026	
09.00 – Selesai	Desk Sesi 1 : • Badan Pendapatan Daerah • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan • Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Perhubungan • Dinas Kelautan dan Perikanan • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral • Dinas Sosial • Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya • Dinas Ketenagakerjaan • Dinas Sumber Daya Air • Inspektorat • Sekretariat DPRD • Badan Keuangan dan Aset Daerah • Badan Kepegawaian • Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia • Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik • Badan Penghubung • Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah • Dinas Perpustakaan dan Arsip

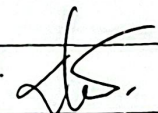
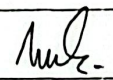
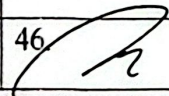
09.00 – Selesai	Desk Sesi 2 : • Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana • Satuan Polisi Pamong Praja • Biro Perekonomian • Biro Kesejahteraan Rakyat • Biro Hukum • Biro Umum • Biro Organisasi • Biro Administrasi Pembangunan • Biro Administrasi Pimpinan • Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah • Biro Pengadaan Barang dan Jasa • Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem • Rumah Sakit Umum Haji Medan • Rumah Sakit Khusus Mata • Rumah Sakit Khusus Paru • Rumah Sakit Umum Kusta • Perumda Tirtanadi • PD Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara • PT Bank Sumut • PT Dhirga Surya • PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara • PT Perkebunan Sumatera Utara
-----------------	---

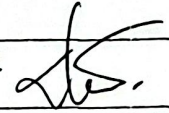
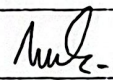
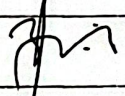
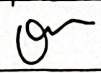
DAFTAR HADIR PESERTA
KEGIATAN *COACHING CLINIC* DAN PEMBINAAN KEPADA PPID
PELAKSANA DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

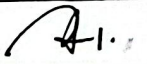
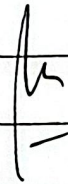
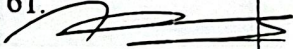
Hari : Kamis
Tanggal : 6 Agustus 2026
Tempat : Aula Transparansi Dinas Kominfo Provsu

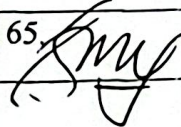
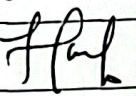
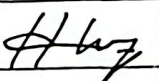
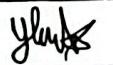
NO	N A M A	INSTANSI	NOMOR HANDPHONE/WA	TANDA TANGAN
1	Desi Natalra Sitorus, S.ST	Dinas Sosial Provsu	082277829090	1. 
2	Hernowo Suluwo	DLHK Provsu	085270961683	2. 
3	Ary PRANDIKA SIREGAR	DLHK Provsu	082252409354	3. 
4	Zulkorranin Siregar	DISKP Provsu	08126510554	4. 
5	TRIONO HARTO	BKAD PROVSU	088261694414	5. 
6	M. Yais	DISKP Provsu	08116322322	6. 
7	Ricky Harizi	Dinas		7. 
8	Aldemengas Futre	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Provsu	085277664177	8. 
9	Boy Utomo Manalu	Beperida Provsu	0813-7620-0916	9. 
10	Dina Leli B. Tambunan	Dinas Perpustakaan & Arsip	085361284354	10. 
11	Nisrina Naupalia	Dinas PKP Provsu		11. 
12	Naya Halika	PKL		12. 

NO	NAMA	INSTANSI	NOMOR HANDPHONE/WA	TANDA TANGAN
13	Efendi d.H. Silaban	BPBD PORSU	0823 7070 9425	13. 3/inf
14	Pang Pihedi	Distribusi Porsu		14. [Signature]
15	A. Kurnia Lubis	BKAD Porsu	0813 37010202	15. [Signature]
16	Siti Nabila Danni Rikini HRP	~~BK~~ KOMINFO	087708233671	16. [Signature]
17	Mh. Tawfik Hidayat	Dinas Porsu	0813 75385507	17. [Signature]
18	Joko Seto Nari	Dus Porsu	0802 992264	18. [Signature]
19	Devi Aurora Nari	Kominfo		19. [Signature]
20	Imana Spk Putri	PKL	0857 9066991	20. [Signature]
21	Dun Putri Astuk	DINSOS	081 362 346162	21. [Signature]
22	Iqbal Jannah	PKL		22. [Signature]
23	Gania Annisa L.G.	Staf		23. [Signature]
24	Ahmad R. S. Ihsan			24. [Signature]
25	Ilham Fadelid	Staf		25. [Signature]
26	Pikawati Pakpahan	Dinas SDA		26. [Signature]
27	Dina Perdana S	PRAD PUSKAPIL PORSU		27. [Signature]
28	Irvan Dwi Putra M	Dinas Porsu		28. [Signature]
29	Lelly Florian	Dinas Perkim		29. [Signature]

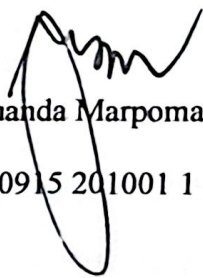
NO	NAMA	INSTANSI	NOMOR HANDPHONE/WA	TANDA TANGAN	
30	Aleksander Saulwing	BPRD Prov	0812 62 445654	30. 	
31	Ricardo Sento Hery Mulya	BAYENDA Prov	0812 17362912		31. 
32	M. Fitri AL-Anshori	Diskominfo	0831 9484 5542	32. 	
33	Mhd. Fathin Daryus	DISKP	0879 611 629		33. 
34	EKO DWI M.	DPEP Sumut	0812 6332 7885	34. 	
35	Andres Ranche	Disporasi	0877 0185 0969		35. 
36	Regina Siahaan	Satpol PP		36. 	
37	Dinar	Dinkes			37. 
38	Josua Sianipar	PMD CAPIL	0823 61 903488	38. 	
39	Farhan Amri	PKL			39. 
40	Yuni Ida	PKL	-	40. 	
41	Riva Marcel	Diskominfo			41. 
42	Mhd. Syukri F	Disnaker	0813 9661 564	42. 	
43	Rini Tanga	Set. DPRD Prov	0852 6280 3457		43. 
44	Henny Simangunsong	Set. Dink Prov	0893-937664	44. 	
45	Vania	Disporasi	0821 624 5202		45. 
46	INDRA MAULANA BERU	Diskop UKM Prov	0851 6132 7057	46. 	

NO	NAMA	INSTANSI	NOMOR HANDPHONE/WA	TANDA TANGAN	
30	Aleksander Santoring	BPRD Prov	0812 62 445654	30. 	
31	Ricardo Sento Henry Manula	BAYENDA Prov	0812 173 62912		31. 
32	M. Fitri AL-Anshori	Diskominfo	0831 9484 5542	32. 	
33	Mhd. Fathin Dayasa	DISKOP	0878 961 629		33. 
34	Eko Dwi M.	DPRD Sumut	0812 6332 7285	34. 	
35	Andreas Ramella	Disporasi	0877 8185 0968		35. 
36	Regina Siahaan	Satpol PP		36. 	
37	Damar	Dinkes			37. 
38	Josua Sianipar	PMDCAPIL	0823 61 963488	38. 	
39	Farhan Amri	PKL			39. 
40	Yuni Ida	PKL	-	40. 	
41	Riva Marcel	Diskominfo			41. 
42	Mhd. Syukri F	Disnaker	0813 9661 569	42. 	
43	Rini Terga	Set. DPRD Prov	0852 6280 3457		43. 
44	Henry Simangunsong	Set. DPR Prov	0873-9387664	44. 	
45	Vania	Disporasi	0821 624 5202		45. 
46	INDRA MAULANA BERU	Diskop UKM Prov	0851 6132 7085	46. 	

NO	NAMA	INSTANSI	NOMOR HANDPHONE/WA	TANDA TANGAN
47	Galang D. Broadi	Disbudparetraf		47. 
48	Khairunnisa .H. Nst	Dishubcu	48. 	
49	Groha Tuna Palang	PKL		49. 
50	Ripai Resto: Sumorany	PKL	50. 	
51	Riyan Andika	Bayez		51. 
52	Monika D K Sembiring	BPSDM	52. 	
53	NINA	PKL		53. 
54	Hotmartua Nasution,SH	BPSDM	54. 	
55	Charles.	Dinas BMBleck		55. 
56	Majis Farah	Kominfo	56. 	
57	Nurul Huda	Dinaker		57. 
58	Jay Lamp	- li -	58.	
59	Ok AGES H.	Setwom		59. 
60	Potua Mega Sari	Setwom	60. 	
61	Agus Nabata rya	Bg pri de		61. 
62	Lory Sumin Y.	Disperkim	62. 	
63	Diva Meilisa	PKL Kominfo		63. 

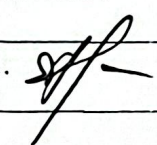
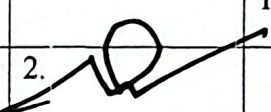
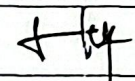
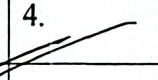
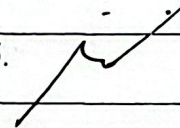
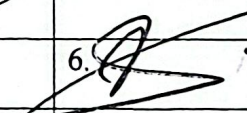
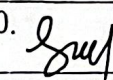
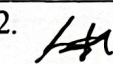
NO	NAMA	INSTANSI	NOMOR HANDPHONE/WA	TANDA TANGAN
64	Wahyu Andri Sibura	Disbudparekras	64.	
65	Jalmanzuan, pte	Dis kominfo	65.	
66	CINDY	DWHR	66.	
67	Eni Rahmatani	Badan Kepegawaian	67.	
68	NASRUH	Dis kominfo	68.	
69	Yakes Sihombing	PKL	69.	
70	M. Rizki	Diskop UKM	70.	

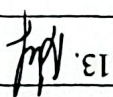
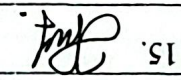
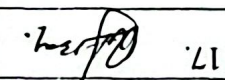
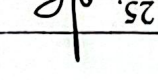
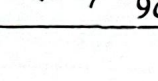
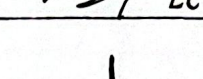
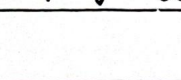
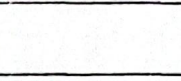
Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
Selaku PPTK

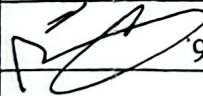
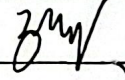
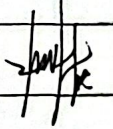

Porman Juanda Marpomari Mahulae, ST, M.Si
Pembina
NIP. 19800915 201001 1 015

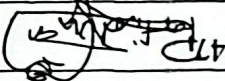
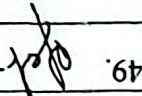
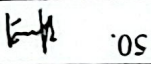
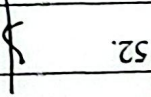
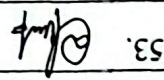
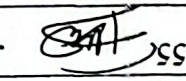
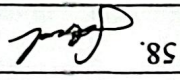
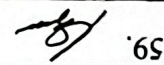
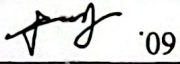
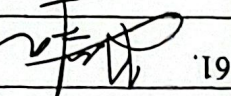
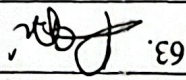
DAFTAR HADIR PESERTA
KEGIATAN COACHING CLINIC DAN PEMBINAAN KEPADA PPID
PELAKSANA DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Hari : Jum'at
Tanggal : 7 Agustus 2026
Tempat : Aula Transparansi Dinas Kominfo Provsu

NO	NAMA	INSTANSI	NOMOR HANDPHONE/WA	TANDA TANGAN
1	EDRIAN H	DPMP TSP	0826553 6325	1. 
2	Masean Muntly	RSJ. Prof. ILdrens.	081260058183	2. 
3	HARIZ/ DHARMA RITA	RSJ PROF DR. MILDREM	081370473458	3. 
4	Dr. T. Anji Fedy	RSJ Prof Dr. Ilan	0817751.422	4. 
5	Philips Hasbora	RJ Prof Dr. Iku		5. 
6	Bismun	DPMP TSP	082166282002	6. 
7	Kiril	---		7. 
8	Erwin N	Biro Organisasi		8. 
9	Faisal Ahmad	Biro Organisasi		9. 
10	Isma Nanda	Perumda Tirtanadi		10. 
11	Sri Wahyuni	---		11. 
12	Faffiq Damani	Biro Hukum		12. 

NO	NAMA	INSTANSI	NOMOR HANDPHONE/WA	TANDA TANGAN
13	Nur Fira Putri	PT. PRU	0812 69734592	13. 
14	Bili Clinton	P1. PRU	0989394423	14. 
15	Zulfkar Ali Ginting	Dinas P3KE & Prosu	08221819 6320	15. 
16	Dargi Yanti	PSS Istim	0857 61283930	16. 
17	Rumia Firdausy	Dinas P3KE & Prosu	08223055707	17. 
18	Dwi Nov	Bare Smit	08223055707	18. 
19	Maden	Bank Smit		19. 
20	Prasadda	Dank Smit		20. 
21	Kristine R.N.SS	Biro Hukum & Litigasi	080173279681	21. 
22	Rizky	TIKAD 1	0816383007	22. 
23	Fidiasya (Sg)	Biro Hukum	0821 8066 8736	23. 
24	Ricard	Biro Perencanaan		24. 
25	Ani Riza Sedyang	Biro Rendak		25. 
26	Indra Iwul Hasan	Biro Perencanaan		26. 
27	Ilham Kurniawan			27. 
28	Arya Bayu S.	—		28. 
29	Aji Gunur	Biro Hukum		29. 

NO	NAMA	INSTANSI	NOMOR HANDPHONE/WA	TANDA TANGAN
30	M. PUSPI ALICAT	BKPD ADPIM	085222458212	
31	Purnadong Sirgar	Biro Organisasi		
32	Pray D S Pratiwi	- 11 -	08118672558	
33	Syaiful Huda	Keuruk Tiranah	082160886490	
34	M. Akbar Ummi	Kira Rem Bda	08136122285	
35	Maureen Chetty		08186091818	
36	ALFI YANDI	Biro Adm. Pembangunan	08217906431	
37	Fahri D	Desa	08136933383	
38	Hasti	PSU HAJI	081264408164	
39	Siti Abdya Rahmi Ratu HPR		087708233671	
40	Muhammad Rofi Akbar		+6289541567779	
41	Mai Farva	Kumuhin		
42	Dua Mubandee	Bank Sumut		
43	Farhan Amri			
44	Siti Khairul Nst	R.S. Haji		
45	Fauz Gah HPR			
46	Hilmy Andreas	Bank Sumut		

NO	NAMA	INSTANSI	NOMOR HANDPHONE/WA	TANDA TANGAN
47	Lokot Papilunguau S	PERUMDA TID TANDU	082314082531	
48	Yakes Sihombing		0236153591	
49	Riki Parhy: Salmawaty		082183084284	
50	Latul Jannah		-	
51	Diva M	PKL	-	
52	Radlu	Praker	0	
53	Yuni Sitanggang	PKL	0	
54	Nakungru Pulu	Diskominfo	-	
55	M. Fida Gani Srg	1250 Haji Medan	0823 7003 9116	
56	Wahyuni Putri Utami	RSU Haji Medan	0823 6406 2432	
57	Irmawati Syah Putri			
58	Ferdi Kurniawan	Biro Adm Pembangunan		
59	Rian Solvia	-u-		
60	Vanni gunawan	Tirtanadi		
61	Naya	PKL		
62	Carla Anisa	-		
63	Begani N/ST	Biro Adm Pim	-	

NO	NAMA	INSTANSI	NOMOR HANDPHONE/WA	TANDA TANGAN
64	Nina Br. Purba		64.	
65	Desy Nurul	Dirjen (Korwa sub)		65. 
66	Novita Shombing	—	66.	Novita.
67	Kanisha Aurelia	P3AKB		67. 
68	John Nst.	—	68.	John
69	Rafael Natalio S	Biro Organisasi		69. 
70	JAHRI SATHIPAZ	Biro Organisasi	70.	

Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
Selaku PPTK

Porman Juanda Marpomari Mahulae, ST, M.Si
Pembina
NIP. 19800915 201001 1 015

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
COACHING CLINIC DAN PEMBINAAN KEPADA PPID
PELAKSANA DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Surat keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Nomor : 800 / 3021 /DKI/VIII/ 2026 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan *Coaching Clinic* dan Pembinaan kepada PPID Pelaksana di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
2. Surat keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Nomor : 800 / 3022 /DKI/VIII/ 2026 tentang Narasumber dan Moderator Kegiatan *Coaching Clinic* dan Pembinaan kepada PPID Pelaksana di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah dengan kode rekening 2.16.02.1.01.0016 tentang Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kegiatan ini berupa kegiatan *Coaching Clinic* dan Pembinaan kepada PPID Pelaksana di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Aula Transparansi Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara Jl. H.M Said No : 27 Medan, pada hari Kamis tanggal 6 Agustus sampai dengan Jum'at, 7 Agustus 2026 Narasumber pada kegiatan tersebut yakni :

➤ Kamis, 6 Agustus 2026

Narasumber Hari Pertama : Rega Tadeak Hakim

Hasil Kegiatan *Coaching Clinic* dan Pembinaan kepada PPID Pelaksana di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus bertempat di Aula Transparansi Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara Jl. H.M Said No : 27 Medan, Kepala Dinas Kominfo Sumut yang diwakili Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Porman Juanda Marpomari Mahulae, ST, M.Si, membuka kegiatan *Coaching Clinic* dan Pembinaan kepada PPID Pelaksana di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam pembukaan sekaligus pengantar kegiatan, Beliau mengatakan Keterbukaan informasi publik bukan lagi

sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen utama dalam membangun kepercayaan masyarakat (*public trust*). Sebagai badan publik, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dituntut untuk terus adaptif, transparan, dan akuntabel. Melalui kegiatan pembinaan yang aplikatif ini, kita berkomitmen untuk menyamakan persepsi, mengurai kendala teknis, dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Sumatera Utara.

Sebagai garda terdepan di masing-masing instansi, PPID Pelaksana memiliki peran yang sangat vital. Kita semua adalah pintu gerbang informasi yang menghubungkan program kerja pemerintah dengan ekspektasi publik. Jika pengelolaan informasi di tingkat pelayanan (*desk*) tidak berjalan baik, maka potret transparansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan akan terganggu. Oleh karena itu, forum ini sengaja kita kemas dalam bentuk *Coaching Clinic* (klinik konsultasi). Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya mendengarkan teori, tetapi dituntut aktif melakukan penjabaran, pemecahan masalah, dan penguatan teknis atas 3 (tiga) urgensi utama : Penyusunan DIP dan DIK yang Presisi Setiap OPD wajib menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) serta Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) secara profesional dan berbasis uji konsekuensi hukum yang benar. Standardisasi Pelayanan dan Digitalisasi memanfaatkan portal PPID utama yang terintegrasi secara optimal. Pelayanan informasi harus cepat, murah, mudah diakses, dan ramah terhadap pengguna, termasuk bagi kelompok disabilitas. Mitigasi Sengketa Informasi Membekali diri dengan pemahaman prosedur yang matang agar setiap permohonan informasi dapat direspons secara tepat waktu guna meminimalisasi terjadinya sengketa di Komisi Informasi.

Selanjutnya Bapak Rega Tadeak Hakim menambahkan penjelasan mengenai Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa. Alasan Mengapa Permendagri No. 2 Tahun 2026 Diterbitkan? (Latar Belakang) adalah pencabutan aturan lama menggantikan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 karena dinilai sudah tidak sesuai dengan dinamika teknologi dan perkembangan hukum. Kemudian Pedoman Tunggal Komprehensif : Menjadi satu - satunya acuan baru yang mengintegrasikan standar pelayanan informasi dari tingkat pusat, daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), hingga ke tingkat Pemerintah Desa. Serta

Penguatan Layanan menjawab kendala operasional lapangan demi meminimalkan potensi sengketa informasi dengan masyarakat maupun media massa. Kemudian Poin Perubahan & Subtansi Utama bagi PPID Pelaksana yaitu Rekonstruksi Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Pengelolaan informasi tidak lagi dianggap sebagai tugas administratif sepihak oleh Kominfo, melainkan melibatkan beberapa pihak berlapis : Atasan PPID Pelaksana (Kepala OPD/Badan/Dinas) : Bertanggung jawab penuh secara hukum atas ketersediaan informasi di instansinya. PPID Pelaksana: Bertugas mengelola, mengklasifikasikan, dan menyediakan data riil pada perangkat daerah masing-masing. PPID Utama (Dinas Kominfo Provinsi): Bertindak sebagai koordinator, integrator portal, dan pembina teknis seluruh PPID Pelaksana. Selanjutnya Beliau menambahkan Integrasi Tata Kelola Digital & Aksesibilitas Khusus Satu Portal Terintegrasi: Mengamanatkan pelayanan informasi berbasis online yang efisien, cepat, dan berbiaya ringan. Mewajibkan penyediaan fasilitas pelayanan yang ramah bagi masyarakat berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas.

Penyusunan Ulang DIP dan DIK: Segera lakukan pemetaan data horizontal di bidang masing-masing. Bedakan dokumen yang merupakan konsumsi publik (seperti Laporan Realisasi Anggaran/LRA) dengan dokumen hak privat (seperti data pribadi ASN/pihak ketiga). Optimalisasi Meja Layanan (*Desk*): Sediakan petugas khusus yang memahami alur tata waktu penyerahan dokumen sesuai batasan hari kerja regulasi baru. Koordinasi cepat jika terdapat permohonan informasi yang dinilai sensitif atau berpotensi sengketa, segera lakukan konsultasi satu pintu dengan PPID Utama di Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara.

Rega Tadeak Hakim menyebutkan faktor penyebab kendala dalam pemenuhan Kuesioner Monev KIP 2025. Pertama Komitmen Pimpinan Daerah yang Rendah atau Tidak Konsisten, lemahnya arahan, pengawasan, dan dukungan pimpinan daerah berdampak pada rendahnya kepatuhan dan keseriusan PPID dalam pengisian kuesioner Monev KIP. Kedua Pengelolaan Layanan Informasi Publik Tidak Terlaksana dengan Baik karena Layanan informasi publik tidak berjalan sesuai ketentuan, sehingga Pemda tidak memiliki dasar data dan bukti implementasi untuk diisikan dalam kuesioner. Ketiga Ketidaksiapan Pemda dalam Pengisian Kuesioner dimana Pengisian kuesioner tidak direncanakan sejak awal tahun, tidak didukung pengumpulan *evidence* secara berkelanjutan, dan dilakukan mendekati batas waktu.

Keempat Koordinasi Internal Perangkat Daerah yang Lemah karena PPID Utama dan PPID Pelaksana tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga data dan dokumen pendukung tidak terkumpul secara komprehensif. Kelima adanya Rotasi Jabatan Pengelola Layanan Informasi sehingga Pergantian pejabat dan petugas pengelola layanan informasi tanpa proses alih pengetahuan menyebabkan hilangnya pemahaman dan kontinuitas pengelolaan data Monev KIP.

Beliau merekomendasi pelaksanaan monev selanjutnya untuk memperhatikan Aspek yang Menjadi Catatan pada Monev KIP sebelumnya dengan rutin melaksanakan Forum antar PPID, pembiasaan dalam Backup Data dan Evidence, utamakan kesiapan sejak awal, bukan saat sanggah penjelasan serta implementasikan Permendagri 2 Tahun 2026 karena mendukung seluruh aspek penilaian SAQ Monev KIP.



➤ Jum'at, 7 Agustus 2026

Narsumber Hari Kedua : Hasta Tama Tasman

Pemprov Sumut Perkuat Pengelolaan PPID, Optimalkan Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terus memperkuat komitmen mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui optimalisasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelayanan Informasi Publik. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh perangkat daerah. Komitmen tersebut ditegaskan pada kegiatan 'Coaching Clinic' dan Pembinaan kepada PPID Pelaksana di lingkungan Pemprov Sumut, yang digelar di Aula Transparansi Dinas Kominfo Sumut, Jalan H.M. Said Nomor 27 Medan, 7 Agustus 2026.

Kepala Dinas Kominfo Sumut yang diwakili Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Porman Mahulae mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah awal untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Kegiatan ini merupakan tahapan awal bagi kita untuk lebih menyeriusi implementasi keterbukaan informasi publik di Sumatera Utara. Kita berkomitmen membawa Sumatera Utara kembali menjadi provinsi yang informatif," ujarnya.

Menurut Porman, hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik menjadi perhatian bersama dan evaluasi tahun ini menjadi momentum pembenahan di seluruh OPD. Beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan antara lain pemenuhan informasi pada website resmi OPD terkait penyelenggaraan pemerintahan, penetapan petugas PPID, serta penyediaan informasi dan dokumen pengadaan barang dan jasa.

Sebagai bentuk dukungan, Dinas Kominfo Sumut tengah mengembangkan portal PPID terintegrasi yang akan menjadi pusat layanan informasi publik seluruh perangkat daerah. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi yang wajib diumumkan secara berkala maupun setiap saat melalui laman <https://ppid.sumutprov.go.id>. "Kita ingin seluruh OPD bersama-sama mengisi portal PPID sehingga kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik dapat terpenuhi sekaligus mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik," kata Porman.

Pada kesempatan itu, narasumber dari Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Puspen Kemendagri), Hasta Tama Tasman, menyosialisasikan Permendagri

Nomor 2 Tahun 2026 yang mengatur penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan pemerintah desa guna memperkuat transparansi serta mencegah sengketa informasi.

Menurutnya, regulasi tersebut disusun untuk menyesuaikan perkembangan kebijakan keterbukaan informasi publik, termasuk Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.

"Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 mengatur pelayanan informasi publik secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, hingga evaluasi. Regulasi ini juga mempertegas peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat," jelasnya.

Beliau juga menambahkan saran untuk meraih predikat "Informatif" (nilai ≥ 90) pada Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026, Pemprov Sumut harus mengalihkan strategi dari sekadar "mengisi kuesioner" menjadi pemenuhan dokumen berbasis bukti berkelanjutan. Kemudian harus ada implementasikan oleh PPID, PPID Pelaksana dan PPID Kepala UPTD Pemprov Sumut untuk memperbaiki Konten Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Saran Tindakan: Setiap PPID Pelaksana wajib mengunggah Ringkasan Kontrak Pengadaan, Rencana Umum Pengadaan (RUP), pemenang tender, hingga progres realisasi anggaran secara berkala ke portal PPID. Jangan menunggu kuesioner keluar. Kedua implementasikan penuh aturan baru Permendagri No. 2 Tahun 2026, jadikan regulasi baru ini sebagai panduan pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ). Pastikan struktur organisasi PPID Pemprov Sumut dimutakhirkan melalui SK Gubernur terbaru yang mengacu pada Permendagri ini, serta lengkapi dokumen hasil Uji Konsekuensi yang valid untuk Informasi Dikecualikan. Ketiga lakukan Self-Audit dan Simulasi SAQ sebelum batas akhir, PPID Utama (Dinas Kominfo) harus mengadakan simulasi penilaian internal (pre-assessment) triwulanan. Nilai kelayakan dokumen diuji terlebih dahulu secara mandiri sebelum draf final diunggah ke sistem Monev KI. Keempat Bangun Sistem Digital Backup Berbasis Bidang (Tertib Evidence). Setiap ada kegiatan, rapat, atau rilis dokumen laporan keuangan (seperti LRA), petugas PPID Pelaksana wajib langsung melakukan backup dokumen pendukung (evidence) ke folder tersebut. Kelima sediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Portal PPID Utama Pemprov Sumut wajib dilengkapi fitur ramah disabilitas (seperti screen reader, pengatur kontras

warna, atau teks alternatif). Di meja layanan fisik (desk), sediakan formulir permohonan berhuruf Braille atau panduan visual yang jelas. Keenam terbitkan Surat Edaran Kepala Daerah untuk Komitmen Berkelanjutan. Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Utama perlu menerbitkan Surat Edaran yang menegaskan bahwa pengisian dan pemenuhan data Monev KIP adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melekat pada jabatan Kepala SKPD (PA-SKPD).



C. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk kemudian dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Mengetahui,
Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik
Diskominfo Provinsi Sumatera Utara

PORMAN JUANDA MARPOMARI MAHULAE, ST, M.SI
NIP. 19800915 201001 1 015